



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI YUROBANAH
2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN KOWANGAN
3. NHK : 840442

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.052.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 768 m2/323 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1986 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 84.700.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.316.200.000
III. HUTANG	Rp.	230.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.086.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.